

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S. Hornby, et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University press, 1963).
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Agus Hermanto, *Modul Pengetahuan Lelang: Penghapusan BMN*, Diklat teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara (Diklat Jarak Jauh) Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta Nopember, 2007.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015.
- Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Chandra Muzaffar, *Wabah korupsi dalam Seri Wawasan Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986.
- Deni Setyawan, *KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008.
- Ermansjah Djaja, *meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1983), hlm. 182. Dikutip dari buku, Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, jakarta, 2006.

- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta : sekretariat jendral MPR RI, 2012.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia (Edisi Revisi)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Syed Hussein Alatas, *sosiologi korupsi: sebuah pejelajahan dengan data kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986.
- W.F. Wertheim, *Segi-Segi Sosiologi Korupsi Di Asia Tenggara*, dalam Muchtar Lubis dan James C. Scoot (ed.), *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1977.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 Tentang Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.

### C. Sumber lain

<http://indowarta.com/49374/kondisi-mobil-lelang-kpk-banyak-yang-sudah-rusak/>

<http://m.viva.co.id/berita/bisnis/850181-cerita-kpk-tentang-sulitnya-rawat-barang-rampasan-korupsi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/10/17595771/kpk.cari.cara.manfa.atkan.barang.sitaan.untuk.kepentingan.publik>

<http://rupbasanjaksel.blogspot.co.id/p/sejarah.html>

Hukum Online, “*Dilema Perawatan Kendaraan Mewah Sitaan KPK Alokasi anggaran perawatan yang minim dan keterbatasan SDM*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585149255a1c5/dilema-perawatan-kendaraan-mewah-sitaan-kpk>.

KPK, “*Peran Kementerian Keuangan dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*” <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/08-Peran-Kemenkeu-dalam-Pemulihan-Aset-TPK-oleh-Menteri-Keuangan-RI.pdf>.

Radio Suara Bekasi, “*Barang-barang hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) banyak menemui kendala, selain terancam rusak, juga nilainya jadi merosot.*”

[http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raya/  
headline-news-pagi/1438-barang-sitaan-kpk-tak-terurus-di-  
rubasan.html](http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raya/headline-news-pagi/1438-barang-sitaan-kpk-tak-terurus-di-rubasan.html).

Wahyu Wiriadinata, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Konstitusi, 2012.